

BAB III

AKSI GOLKAR DALAM POLITIK INDONESIA TAHUN 1998

3.1. Hubungan Golkar dengan Soeharto

Hubungan Golkar dengan Soeharto bersifat simbiosis mutualistik, di mana Golkar menjadi mesin politik untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru, sementara Soeharto memberikan akses kekuasaan struktural melalui birokrasi dan militer.⁷⁶ Golkar dengan Soeharto merupakan hubungan yang saling melanggengkan kekuasaan satu sama lain selama era Orde Baru. Sebagai kekuatan politik dominan, Golkar tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan Soeharto, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan negara yang terintegrasi dengan struktur birokrasi dan militer. Golkar memainkan peran sentral sebagai partai yang mengakomodasi kehendak negara, bukan sebagai alat aspirasi rakyat sebagaimana lazimnya dalam sistem demokrasi. Konsekuensinya, hubungan antara Golkar dan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari mekanisme kontrol kekuasaan yang terpusat pada Presiden.

Kedekatan personal antara Harmoko dan Soeharto memperkuat legitimasi kekuasaan Golkar. Harmoko, yang menjabat sebagai Menteri Penerangan selama hampir 15 tahun, bertanggung jawab atas strategi komunikasi politik pemerintah, termasuk pembentukan opini publik melalui media yang dikontrol negara. Posisi strategis ini menjadikan Harmoko sebagai salah satu tokoh penting dalam membangun citra Soeharto dan Orde Baru. Akan tetapi, loyalitas ini mengalami

⁷⁶ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 -2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Tahun 2007, hlm. 687.

pergeseran ketika dinamika politik nasional berubah secara drastis akibat krisis ekonomi dan meningkatnya tekanan publik menjelang tahun 1998. Perubahan sikap Harmoko, dari loyalis menjadi penyeru pengunduran diri Soeharto, menjadi titik balik dalam hubungan Golkar dan Soeharto. Dalam perspektif politik institusional, tindakan Harmoko dapat dilihat sebagai bentuk respons institusional terhadap tekanan eksternal dan kepentingan jangka panjang organisasi Golkar. Pernyataan Harmoko pada 18 Mei 1998 di DPR yang meminta Soeharto mundur, lebih merupakan langkah strategis menjaga eksistensi Golkar di tengah gelombang reformasi ketimbang pengkhianatan personal.

Kekecewaan Soeharto terhadap Harmoko dan Golkar mencerminkan keterpisahan antara simbol kekuasaan personal dengan struktur partai politik. Padahal sebelumnya, Soeharto memegang otoritas absolut sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dengan hak untuk membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), membekukan kepengurusan, dan bahkan mengontrol komposisi calon legislatif. Ketika tekanan politik meningkat, otoritas ini tak lagi cukup untuk membendung desakan perubahan dari dalam maupun luar Golkar. Secara struktural, Golkar memang terpecah dalam dua kubu: kelompok loyalis dan reformis. Perpecahan ini menandai transformasi politik dalam tubuh Golkar dari organisasi social politik yang birokratis menuju aktor politik yang lebih adaptif terhadap demokratisasi. Harmoko dan tokoh-tokoh seperti Ginandjar Kartasasmita dan Marzuki Darusman memosisikan diri sebagai agen perubahan, sementara kelompok seperti Edi Sudrajat berupaya mempertahankan status quo. Fraksi ini

memperlihatkan proses dialektika politik internal yang krusial dalam menjatuhkan rezim Soeharto.

Keputusan Harmoko bukanlah aksi soliter, melainkan bagian dari strategi kolektif untuk mengamankan transisi politik dan menghindari kekacauan lebih lanjut.⁷⁷ Oleh karena itu, aksi Harmoko dan faksi reformis Golkar dapat dipahami sebagai “harakiri politik” yang disengaja untuk menyelamatkan legitimasi Golkar di masa depan. Ini juga dibuktikan dari posisi strategis Golkar dalam kabinet transisi pasca-Soeharto yang tetap dipertahankan oleh B.J. Habibie. Momen pernyataan Harmoko yang meminta Soeharto mundur merupakan kulminasi dari berbagai dinamika politik yang berlangsung sejak akhir 1997. Tidak hanya tekanan dari luar, seperti aksi mahasiswa dan krisis ekonomi, tetapi juga tekanan internal dalam tubuh Golkar dan lembaga legislatif memainkan peran kunci. Sikap Harmoko didukung oleh fraksi-fraksi di DPR dan MPR, termasuk Fraksi Karya Pembangunan (FKP) yang sebelumnya dikenal loyal terhadap pemerintah.

Golkar kemudian berusaha melakukan rebranding pasca-Orde Baru agar tidak larut dalam stigma rezim represif. Proses ini mencakup reformasi internal dan pembentukan citra sebagai partai reformis yang terbuka dan demokratis. Dalam konteks ini, peristiwa 1998 menjadi fase penting dalam transformasi identitas Golkar, dari partai pemerintah menjadi partai politik peserta demokrasi multipartai. Peran elite internal sangat penting dalam proses pembelahan kekuasaan. Tanpa perpecahan elite seperti yang terjadi di tubuh Golkar, jatuhnya Soeharto tidak akan

⁷⁷ Burhanuddin N, *Harakiri Politik Tokoh Nasional & Elit Golkar*, Jakarta: RMBOOKS, Tahun 2007, hlm. 45.

terjadi secepat itu. Harmoko, dalam hal ini, memainkan peran sebagai tipping point yang memfasilitasi transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, hubungan antara Golkar dan Soeharto bukan hanya soal kesetiaan atau pengkhianatan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dinegosiasikan dalam tekanan sistemik. Golkar yang awalnya menjadi alat kekuasaan Soeharto, pada akhirnya menjadi medium peralihan kekuasaan yang signifikan melalui manuver politik tokoh-tokohnya, termasuk Harmoko.

3.2. Kronik Aksi Golkar dalam menjatuhkan Soeharto

Golongan Karya (Golkar) memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan Soeharto selama masa Orde Baru, Soeharto menjabat sebagai presiden terlama dalam sejarah Indonesia, yakni selama 32 tahun (1967-1998). Golkar menjadi kendaraan politik utama bagi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan memenangkan mayoritas suara dalam setiap pemilihan umum. Meskipun Soeharto tidak pernah menduduki kursi Ketua Umum Golkar, namun memiliki peran sentral sebagai Ketua Dewan Pembina.⁷⁸ Jabatan ini memberikan Soeharto kewenangan besar dalam organisasi, menjadikannya figur paling penting dan berkuasa di Golkar. Kemenangan Golkar dalam setiap pemilu selama Orde Baru tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh Soeharto, dengan dukungan kuat dari militer, birokrasi, dan struktur organisasi Golkar yang Solid. Golkar membangun jaringan hingga tingkat desa dan mendapatkan dana untuk

⁷⁸ TEMPO, Mengapa Soeharto Tak Pernah Menduduki Kursi Ketua Umum Golkar

mempromosikan pemerintah. Pegawai negeri sipil diwajibkan untuk mendukung Golkar, dan kepala desa menerima kuota suara yang harus dipenuhi untuk Golkar.⁷⁹

Tanggal 1 Mei 1998, Harmoko bersama pimpinan fraksi menyampaikan tuntutan reformasi dari masyarakat kepada Soeharto melalui konsultasi pimpinan DPR dengan mandatarisnya. Soeharto menjawab bahwa reformasi akan dilakukan di bidang hukum, ekonomi dan politik, namun dilakukan secara konstruktif hingga tidak mengganggu stabilitas yang sudah ada.⁸⁰ Soeharto melalui Menteri dalam Negeri Harno dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003 dan pernyataan itu diralat Soeharto keesokan harinya tanggal 2 Mei 1998 bahwa reformasi bisa dilakukan sekarang (tahun 1998).⁸¹

Tanggal 8 Mei 1998, Anggota Komisi V DPR meminta penundaan kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan harga BBM serta menuntut pembatalan Keppres No. 69 dan 70 tahun 1998. Aturan tersebut dibuat pemerintah tanpa mengajak bicara DPR, kata anggota Fraksi ABRI, masyarakat akan sangat dirugikan oleh keppres tersebut. 16 guru besar dari lima perguruan tinggi terkemuka di Indonesia berkumpul di Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membahas masalah reformasi. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung aspirasi mahasiswa tentang reformasi dan mengajak semua pihak menggalang kerja sama.⁸²

Tanggal 9 Mei 1998, Soeharto berbicara lagi tentang reformasi di depan wartawan sebelum berangkat ke Kairo untuk kunjungan kenegaraan dan

⁷⁹ Indonesia Investments, Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter.

⁸⁰ Dwi Prasdi N, dkk. *Golkar Retak?*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Tahun 1999, hlm. 68.

⁸¹ Distiana E. *Masa Reformasi*, Pontianak: Derwati Press. Tahun 2018, hlm. 34.

⁸² Pikiran Rakyat, 09/05/1998

menghadiri KTT G-15. Presiden kedua tersebut terus berkomitmen bahwa pemerintah akan melakukan perubahan. Dengan berbagai syarat yang dia ajukan sendiri, tentu saja. Presiden Soeharto meminta semua pihak untuk memberi kesempatan kepada DPR untuk memulai reformasi, dengan mengubah UU Pemilu, UU Parpol dan Golkar, serta UU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD. Presiden mengakui kelemahan UU yang saat ini. Ini diajukan di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum melanjutkan perjalanannya ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT G-15. Soeharto juga menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir bahwa pemerintah tidak akan melakukan reformasi. Dia berkata, "Reformasi sekarang telah menjadi kebulatan kita." Soeharto mengingatkan pula, keinginan melakukan reformasi jangan sampai mengorbankan segala-galanya sehingga merusak hasil pembangunan.⁸³ Saat itu, pemerintahan sementara dipegang oleh Habibie selaku Wapres. Namun, permainan Habibie mulai terlihat saat Soeharto pergi. Tempat seperti Istana wakil presiden dan Masjid Istiqlal sering terlihat dipakai untuk pertemuan rutin dari para pendukung Habibie. Beberapa kalangan militer diduga terlibat dalam pertemuan ini. Militer inilah yang kerap disebut sebagai ABRI hijau yang berbasiskan Islam dan dikenal dekat dengan Habibie.⁸⁴

Tanggal 13 – 15 Mei 1998, Suasana Jakarta mencekam. Korban tewas mencapai 499 orang di Jakarta selama kerusuhan selama tiga hari, dan sekitar 1.000 perusuh ditangkap oleh polisi. Di daerah lain, keadaan terus memburuk. Wahab

⁸³ Pikiran Rakyat, 10/05/1998.

⁸⁴ Dwi Prasdi N, dkk. *Golkar Retak?*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Tahun 1999, hlm. 66.

Mokodongan, juru bicara ABRI, menyampaikan permintaan maaf atas semua peristiwa yang tidak menyenangkan yang telah terjadi. Namun, hingga kini kasus ini tidak terkuak sama sekali, meski Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah telah menyampaikan sejumlah temuan dan rekomendasinya. Lalu Ketua MPR/DPR Harmoko mengemukakan bahwa presiden dalam waktu dekat akan merombak Kabinet Pembangunan VII. Ini dilakukan untuk membentuk kabinet yang kuat dalam memikul tugas dan tanggung jawab pembangunan.⁸⁵

Tanggal 16 Mei 1998, setelah Soeharto pulang dari Kairo, Harmoko selaku Ketua MPR/DPR bertemu dengan Soeharto dan mengumumkan akan melakukan *reshuffle* kabinet. Harmoko merinci, pertemuan konsultasi pimpinan DPR dan Presiden berlangsung selama 1 jam 30 menit sejak pukul 11.00 WIB. Pimpinan DPR menyampaikan aspirasi rakyat yang masuk ke DPR baik yang langsung maupun melalui surat. Terdapat tiga aspirasi, pertama melakukan reformasi segera, kedua presiden mengundurkan diri, dan ketiga melakukan sidang istimewa MPR. Soeharto merespon aspirasi tersebut dengan berkata “Jika fraksi – fraksi DPR menilai Presiden sudah tidak dipercaya dan harus mundur, bagi saya tidak ada masalah dan saya rela untuk mundur”. Hal itu yang menjadikan Harmoko mempunyai dasar pijakan untuk berani menyatakan bahwa Soeharto harus mundur dalam pernyataan pers yang digelarnya pada tanggal 18 Mei 1998. Selain itu, tanda pergerakan di Golkar sudah terlihat ketika kosgoro yang merupakan kino golkar

⁸⁵ Jakarta Post, 17/05/1998.

menyusul KNPI yang sebelumnya juga sudah mundur, melalui ketuanya, Bambang W, Soeharto menyatakan secara resmi agar Soeharto mundur.⁸⁶

Tanggal 17 Mei 1998, Abdul Latief sebagai menteri Pariwisata, Seni dan Budaya dan juga Anggota DPR/MPR dari Golkar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri Kabinet Pembangunan VII. Abdul Latief menulis surat pengunduran diri untuk diajukan kepada Presiden dengan menggunakan kop surat perusahaan Latief dan bergambar burung garuda.⁸⁷ Salah satu kalimat dalam surat tersebut berbunyi “Kami juga sepenuhnya mendukung reformasi tersebut dalam rangka mewujudkan kehidupan yang adil, demokratis, dan sejahtera sesuai dengan cita – cita nasional bangsa Indonesia”. Hal tersebut menjadi pukulan awal Golkar bagi Soeharto di tengah tuntutan Reformasi dari segala pihak.

Tanggal 18 Mei 1998, Para Mahasiswa mulai menduduki gedung DPR/MPR. Komplek Kantor Wakil Rakyat ini diwarnai sorak-sorai ribuan mahasiswa, puluhan cendekiawan, dan beberapa pensiunan jenderal. Mereka semua menuntut reformasi dan mendesak presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi hal ini, pimpinan MPR/DPR berusaha tanggap atau memang sudah direncanakan pada pukul 14.00 WIB mengadakan rapat pleno. Para pimpinan fraksi dipanggil untuk melaporkan aspirasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang datang pada mereka untuk menuntut agar Soeharto mundur.⁸⁸ Menjelang sore, sekitar pukul 15.00, ratusan mahasiswa meninggalkan gedung DPR/MPR sambil menyanyikan yel-yel ciptaan sendiri

⁸⁶ *Op.cit.* hlm. 69.

⁸⁷ Ecip. S. *Kronologi Situasi Penggulingan Soeharto: Reportasi Jurnalistik*. Bandung: Mizan. Tahun 1998. hlm. 72.

⁸⁸ *Op.cit.* hlm. 68.

tentang reformasi. Ketua DPR/MPR Harmoko kemudian mengeluarkan pernyataan pers yang pada saat itu didampingi juga oleh para wakilnya. Harmoko berkata:

Pimpinan Dewan dalam rapatnya hari ini telah mempelajari dengan cermat dan sungguh – sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk Sidang Umum MPR dan pengunduran Presiden. Untuk pembahasan masalah tersebut, besok tanggal 19 Mei 1998 Pimpinan Dewan akan melaksanakan pertemuan dengan Pimpinan Fraksi – fraksi. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Soeharto. Mekanisme tersebut ditempuh sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan, karena dalam mengambil keputusan Pimpinan Dewan harus bersama – sama Pimpinan Fraksi – fraksi. Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, Pimpinan Dewan, baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional.⁸⁹

Sekitar pukul 18.00 WIB, Soeharto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri termasuk Wiranto. Setelah pertemuan itu, Wiranto langsung memimpin rapat dadakan untuk menyampaikan pesan dari Soeharto sebagai pangti kepada semua kepala staf Angkatan/Polri, panglima komando di Mabes ABRI. Selepas hal itu, Wiranto mengadakan siaran pers yang menyatakan bahwa pernyataan Harmoko yang menuntut Soeharto agar mengundurkan diri merupakan sebuah pernyataan pribadi yang disampaikan secara kolektif. Menurut Wiranto, ABRI mendukung reformasi di bawah presiden dengan melakukan *reshuffle* kabinet dan membentuk Dewan Reformasi.⁹⁰

⁸⁹ Sekretariat Jenderal DPR-RI, *DPR-RI dalam Menyikapi*, hlm. 24-25 dalam Bahtiar Effendy. *Beringin Membangun: Sejarah Politik Partai Golkar*. Bandung: Grafindo. Tahun 2012, hlm 145

⁹⁰ *Op.cit.* hlm. 70.

Harmoko tetap yakin dengan keputusannya meskipun mendengar komentar dari Wiranto perihal pernyataan yang dianggap pribadi karena Harmoko berpegang pada Fraksi ABRI yang ada di DPR bahkan pernyataannya ditandatangani oleh ketua Fraksi ABRI Syarwan Hamid. Harmoko mengatakan jika bertentangan, Fraksi ABRI tidak akan mungkin menandatangani pernyataan tersebut. Hal ini pun dibenarkan oleh Syarwan Hamid yang mengatakan bahwa saat itu memang terlihat adanya sinyal – sinyal ABRI yang menginginkan Soeharto turun, kendati harus tetap bertahan, karena di dalam ABRI sendiri bergantung pada garis komando dan Soeharto merupakan panglima tertinggi.⁹¹ Kemudian, Pernyataan Harmoko tidak hanya disanggah oleh Wiranto saja. Malamnya Harmoko dimintai pertanggungjawaban pada Rapat Pleno Fraksi di DPP Golkar. Abdul Gafur selaku Wakil Ketua MPR juga diikutsertakan pertanggungjawabannya. Setelah itu, Ary Mardjono selaku Sekjen DPP Golkar menyatakan kepada wartawan bahwa membenarkan pernyataan Harmoko bahwa itu adalah pernyataan yang bersifat pribadi dan bukan pernyataan DPP Golkar. Namun Harmoko hanya menjawab bahwa memang ada sebagian orang di Golkar yang tetap ingin mempertahankan Soeharto sebagai Presiden, Ary Mardjono termasuk salah satunya.⁹² Hal tersebut memperlihatkan bahwa terjadi pergolakan yang cukup keras di dalam tubuh Golkar, Pihak yang meminta Soeharto mundur berdalih bahwa itu merupakan aspirasi masyarakat dan demi persatuan dan kesatuan bangsa, Sementara pihak yang

⁹¹ *Op.cit.*

⁹² *Op.cit.* hlm. 71.

mempertahankan Soeharto menuduh lawannya bahwa itu merupakan sebuah pengkhianatan dan keinginan pribadi.

Tanggal 19 Mei 1998, Selasa dini hari di kantor DPP Golkar Jakarta Barat, mengutip penjelasan Ketua Umum DPP Golkar Harmoko, dalam rapat pleno DPP Golkar. Ary Mardjono dalam keterangannya didampingi dua pengurus DPP Golkar, masing – masing HR Agung Laksono dan Ais Anantama Said “Beliau juga menyadari bahwa itu memang betul pendapat individual. Karena kalau itu pendapat dari Pimpinan DPR atau seluruh DPR, maka harus melalui satu sidang paripurna. Jadi memang betul itu pendapat individu sebenarnya dan disampaikan secara serentak selaku pimpinan DPR” kata Ary maupun Agung mengutip Harmoko, lanjutnya “Dengan demikian, membenarkan pernyataan Pak Wiranto bahwa hal itu merupakan pernyataan secara individual” paparnya Ketika ditanya wartawan berkaitan dengan keterangan pers Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto. Sedangkan sikap DPP Golkar sehubungan dengan pendapat individual pimpinan DPR RI tersebut, dijelaskan oleh Sekjen DPP Golkar mengutip penjelasan Ketua Umum DPP Golkar, bahwa setelah dicapai satu kesepakatan yang tertuang dalam instruksi kepada FKP DPR RI, agar dibahas bersama fraksi – fraksi lainnya pada hari Selasa ini. “karena tadi sudah disampaikan kepada Ketua FKP, maka untuk itu kelak akan disampaikan setelah diadakan rapat bersama fraksi – fraksi yang lain di DPR” jelasnya. Adapun bunyi dari instruksi tersebut, lanjutnya, tidak bisa dijelaskan secara terbuka dalam keterangan pers, Selasa dini hari karena masih harus dibahas dengan fraksi – fraksi yang lain.⁹³

⁹³ Suara Pembaruan, 19/05/1998.

Rapat tertutup FKP di DPR digelar selama lima jam untuk melanjutkan rapat pleno yang satu hari sebelumnya belum usai.⁹⁴ Golkar terbelah menjadi dua, kubu pertama merupakan koalisi dari kubu Harmoko dan Habibie yang menginginkan Soeharto turun sebagai Presiden, lalu kubu kedua merupakan kubu Ary Mardjono yang ingin mempertahankan Soeharto sebagai Presiden. Namun kubu yang pertama adalah kubu yang besar dan sangat kuat, dalam kubu tersebut terdapat kelompok 20 dari FKP di DPR yang terdiri dari Eki Syachrudin, Hariady Ahmad, Usman Ermulan, Iqbal Assegaf, Komaruddin Ahmad, Yanto, Priyo Budi Santoso, Fachri Andi Leluasa, Azhar Romli, Siti Ainomi, Ibrahim Ambong, Zamharir AR, Ibnu Munzir, Hajriyanto, Abu Hasan Sazili, Ferry Mursidan, Laode M. Kamaludin, Yahya Zaini, Gandjar Razuni dan Engkoswara. Merekalah yang memprovokasi opini Soeharto harus lengser dalam rapat tersebut. “Kami tidak ingin Golkar dibilang tak mau mendengar aspirasi rakyat” salah satu ucapan dari anggota kelompok 20. Sementara itu, kubu yang ingin mempertahankan Soeharto juga bersikeras. Pada akhirnya diputuskanlah *voting* sebagai penyelesaian.⁹⁵

Siasat dilakukan oleh Kubu Habibie ketika *voting* berlangsung, dari 225 jumlah anggota FKP di DPR, hanya 160 anggota yang hadir dan kebanyakan adalah dari kubu Habibie. Sedangkan kubu Ary Mardjono tidak banyak diberitahu. Hasil *voting* menunjukkan 125 suara dari kubu Habibie yang menginginkan Soeharto lengser menjadi pemenang dalam rapat tersebut. Timbul protes keras dari kubu Ary Mardjono terkait hasil *voting* tersebut karena rekan – rekan anggota FKP yang

⁹⁴ *Op.cit.*

⁹⁵ *Op.cit.* hlm. 72.

lainnya tidak diberitahu akan ada *voting*. Namun, Skenario tetap dijalankan oleh Irsyad Sudiro selaku Ketua FKP yang juga masuk ke dalam kubu Habibie memberikan ketuk palu terkait hasil *voting* tersebut. “FKP secara konstitusional akan mencermati bagaimana mekanisme lengser keprabon dan pelaksanaan Sidang Istimewa” ungkap Ketua FKP Irsyad Sudiro.⁹⁶

Terdapat empat skenario dari hasil rapat tertutup FKP yang telah diselenggarakan di DPR untuk mengatasi keadaan. Pertama, mendukung presiden sebagai pelaksana reformasi. Kedua, presiden secara sukarela mengundurkan diri dan karena itu wapres menjabat presiden. Ketiga, DPR melaksanakan Sidang Umum MPR. Keempat, presiden dan wapres mengundurkan diri dan pemerintah sementara dipegang oleh *triumvirat* (mendagri, menhankam, menlu). Di tengah keadaan yang berubah, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan di Istana Merdeka dengan para tokoh masyarakat dan ulama seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie selama 2,5 jam. Setelah pertemuan itu, Presiden menyatakan akan mengundurkan diri secara konstitusional melalui Sidang Umum MPR untuk mengganti presiden dan wakil presiden tetap. Soeharto juga akan membantu Komite Reformasi dan memimpin sendiri reformasi di berbagai bidang.⁹⁷ Dengan menyatakan akan memimpin sendiri reformasi, Soeharto berupaya menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali dan berkomitmen melakukan perubahan dari dalam pemerintahan, bukan sekadar menyerahkan proses reformasi kepada pihak lain. Langkah ini juga dimaksudkan

⁹⁶ *Op.cit.* hlm. 73

⁹⁷ *Republika*, 20/05/1998.

untuk meredam desakan agar ia mundur, dengan menawarkan solusi kompromi berupa reformasi yang dipimpin langsung olehnya dan melibatkan unsur masyarakat, perguruan tinggi, serta para pakar dalam Komite Reformasi. Pada waktu yang bersamaan, para mahasiswa dari berbagai kalangan berhasil menduduki gedung MPR/DPR.⁹⁸

Tanggal 20 Mei 1998, Dewan pimpinan MPR/DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa di Gedung MPR/DPR Senayan pada pukul 16.45. Dalam konferensi pers sebelumnya, dewan meminta Soeharto mengundurkan diri. Dewan juga mengumumkan bahwa mereka memberikan batas waktu bagi Presiden untuk mundur sampai Jumat 22 Mei. DPR akan bersidang pada Senin untuk memutuskan diadakannya siding umum istimewa jika Soeharto menolak. Pada pukul 17.30 para anggota Golkar Menyusun proses konstitusional untuk mencabut Ketetapan MPR/DPR tentang Presiden dan Wapres.⁹⁹ Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) Ginandjar Kartasasmita melangsungkan rapat koordinasi di gedung Bappenas Jakarta Pusat dan dihadiri lima belas menteri Kabinet Pembangunan VII pada waktu yang bersamaan. Menko Ekuin menyatakan:

Umur Republik Indonesia saat ini, ditinjau dari segi ekonomi hanya tinggal lima hari, sehingga merupakan situasi gawat apabila tidak diambil langkah – langkah reformasi di segala bidang. Kabinet baru yang akan dibentuk Pak Harto juga tidak akan menyelesaikan masalah, oleh karena itu saya secara pribadi menyatakan tidak akan duduk dalam kabinet baru yang akan dibentuk Pak Harto esok hari, 21 Mei 1998. Kalau para menteri yang lain sependapat dengan saya, mari kita secara bersama – sama menulis surat untuk Pak Harto.¹⁰⁰

⁹⁸ Distiana E. *Masa Reformasi*, Pontianak: Derwati Press. Tahun 2018, hlm. 33.

⁹⁹ TEMPO, 04/01/1999

¹⁰⁰ Ambarsari A.D. dkk. *Pak Harto The Untold Stories*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun 2012, hlm. 194.

Kesimpulan dan ajakan Ginanjar tentang kondisi ekonomi dan politik tersebut mendapat justifikasi dari peserta rapat. Empat belas menteri menyatakan secara bersama-sama untuk menolak bergabung dengan Kabinet Reformasi yang akan dibentuk Soeharto dan menandatangani surat pernyataan yang dikenal dengan nama ‘Deklarasi Bappenas’. Isi pernyataan empat belas menteri bahwa “sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukkseskan catur krida Kabinet Pembangunan VII Kalimat itu tegas menyatakan tidak mengundurkan diri, tetapi keempat belas menteri itu juga menyatakan menolak masuk dalam kabinet baru yang sedang disusun Soeharto.¹⁰¹ Hal tersebut merupakan pukulan yang sangat dahsyat bagi Soeharto yang malam itu sedang menyusun kabinet reformasi yang sebagian besar dari empat belas menteri itu termasuk di dalamnya.¹⁰² Keempat belas menteri tersebut adalah Akbar Tandjung (Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman), A.M. Hendropriyono (Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan), Ginandjar Kartasasmita (Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas), Kuntoro Mangkusubroto (Menteri Pertambangan dan Energi), Giri Suseno Hadihardjono (Menteri Perhubungan), Haryanto Dhanutirto (Menteri Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan), Justika S. Baharsjah (Menteri Pertanian), Rachmadi Bambang Sumadhijo (Menteri Pekerjaan Umum), Rahardi Ramelan (Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT), Theo L. Sambuaga (Menteri Tenaga Kerja), Sanyoto Sastrowardoyo (Menteri

¹⁰¹ Lihat Surat Deklarasi Bappenas, Lampiran 10.

¹⁰² *Op.cit*, hlm. 196.

Investasi/Kepala BKPM), Subiakto Tjakrawerdya (Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil), Sumahadi (Menteri Kehutanan dan Perkebunan) dan Tanri Abeng (Menteri Pendayagunaan BUMN).¹⁰³ Hanya Ary Mardjono (Menteri Agraria) yang tidak ikut menolak untuk bergabung dalam Kabinet Reformasi dan menyatakan akan tetap mendukung Soeharto.

Tanggal 21 Mei 1998, Seluruh pimpinan MPR/DPR yaitu Harmoko, Abdul Gafur, Fatimah Ahcmad, Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid dan Sekjen DPR Afif Ma'roef berkumpul untuk rapat di kediaman Harmoko pada Pukul 07.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Harmoko menyampaikan situasi terakhir mengenai rencana pengunduran Soeharto sesuai pasal 8 UUD 1945. Rapat memutuskan bahwa pimpinan MPR/DPR mengambil sikap untuk mengupayakan tetap berpegang pada pasal 8 tersebut serta pasal 2 TAP MPR No. VII/MPR/1973 yang mengharuskan jika presiden berhenti maka pengucapan sumpah wapres dilakukan di depan sidang paripurna DPR. Sekjen Afif Ma'roef diminta untuk lebih dahulu berangkat ke istana selepas rapat selesai untuk mengkoordinasikan segala sesuatunya, sedangkan pimpinan MPR/DPR yang lainnya menyusul pada pukul 08.00 WIB. Para pimpinan MPR/DPR bertanya kepada Sarwata selaku Ketua MA mengenai pelaksanaan yang dilakukan di istana dan bukan di depan dewan itu sah atau tidak, Sarwata menjawab sah, karena pertama hari tersebut merupakan hari libur nasional, kedua karena di gedung DPR masih diduduki oleh mahasiswa. Pukul 09.00 WIB di Istana Negara, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik

¹⁰³ Dwi Prasdi N, dkk. *Golkar Retak?*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Tahun 1999, hlm. 76.

Indonesia di hadapan ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dan langsung disumpah sebagai presiden saat itu juga oleh ketua Mahkamah Agung.¹⁰⁴

Dalam transformasi identitas Golkar. Proses perpecahan elite internal, khususnya peran Harmoko sebagai faktor kunci dalam mempercepat transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Golkar yang awalnya merupakan alat kekuasaan Soeharto, pada akhirnya menjadi medium peralihan kekuasaan melalui manuver politik para tokohnya. Hal ini menyoroti bahwa hubungan antara Golkar dan Soeharto tidak dapat dipahami secara hitam-putih sebagai sekadar kesetiaan atau pengkhianatan. Sebaliknya, relasi ini mencerminkan negosiasi kekuasaan di bawah tekanan sistemik, di mana elite partai harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan politik demi menjaga kelangsungan organisasi. Golkar, melalui aksi-aksi elite reformisnya, berhasil mengubah dirinya dari simbol status quo menjadi aktor transisi yang signifikan dalam sejarah politik Indonesia.

Dengan demikian, keberhasilan transisi politik 1998 tidak terlepas dari kemampuan adaptasi dan strategi internal Golkar. Fragmentasi elite dan keberanian mengambil risiko politik-meski harus mengorbankan Soeharto menjadi pelajaran penting tentang bagaimana partai penguasa dapat bertahan dan bahkan tetap relevan dalam sistem politik baru yang lebih demokratis. Golkar, melalui proses ini, menunjukkan bahwa kekuasaan dalam politik selalu bersifat dinamis dan hasil dari

¹⁰⁴ Distiana E. *Masa Reformasi*, Pontianak: Derwati Press. Tahun 2018, hlm. 33.

negosiasi berkelanjutan antara kepentingan, tekanan eksternal, dan kebutuhan adaptasi institusional.

Korelasi Teori konflik dari Ibnu Khaldun terlihat dalam pembahasan ini yang berakar pada konsep *ashabiyyah* (solidaritas sosial) yang menjadi motor penggerak lahir, berkembang, dan runtuhnya kekuasaan. Ibnu Khaldun memandang bahwa konflik dalam masyarakat sering kali dipicu oleh perebutan sumber daya, status, dan legitimasi kekuasaan. Dalam konteks Golkar tahun 1998, konflik internal antara kubu loyalis dan reformis mencerminkan erosi solidaritas internal (*ashabiyyah*), yang diperparah oleh tekanan eksternal berupa demonstrasi mahasiswa dan krisis ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun, ketika solidaritas kelompok melemah dan elite terpecah, maka kekuasaan akan mengalami disintegrasi dan perubahan besar.